



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI)
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AGUNG SUPRIO**
2. Jabatan : **KETUA**
3. NHK : **651948**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	500.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 15 m ² /15 m ² di KAB / KOTA PANDEGLANG, HASIL SENDIRI		Rp. 500.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	300.000.000
1. MOBIL, INNOVA MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI		Rp. 300.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.082.641.605
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.882.641.605
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.882.641.605

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2021/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI)
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MULYO HADI PURNOMO**
2. Jabatan : **WAKIL KETUA**
3. NHK : **810477**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **950.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 124 m2/140 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **159.000.000**

1. MOBIL, HONDA FREED Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
3. MOTOR, VESPA SPRINT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 41.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **----**

D. SURAT BERHARGA Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **16.180.000**

F. HARTA LAINNYA Rp. **----**

Sub Total Rp. **1.125.180.000**

III. HUTANG Rp. **505.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **620.180.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI)

UNIT KERJA : KOMISI PENYIARAN INDONESIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MOHAMAD REZA

2. Jabatan : ANGGOTA

3. NHK : 718101

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 350.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m²/154 m² di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 270.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU SIGRA MINIBUS/MOBIL PENUMPANG Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. MOBIL, HONDA MOBILIO RS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 58.200.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 6.176.660

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 684.376.660

III. HUTANG Rp. 416.304.097

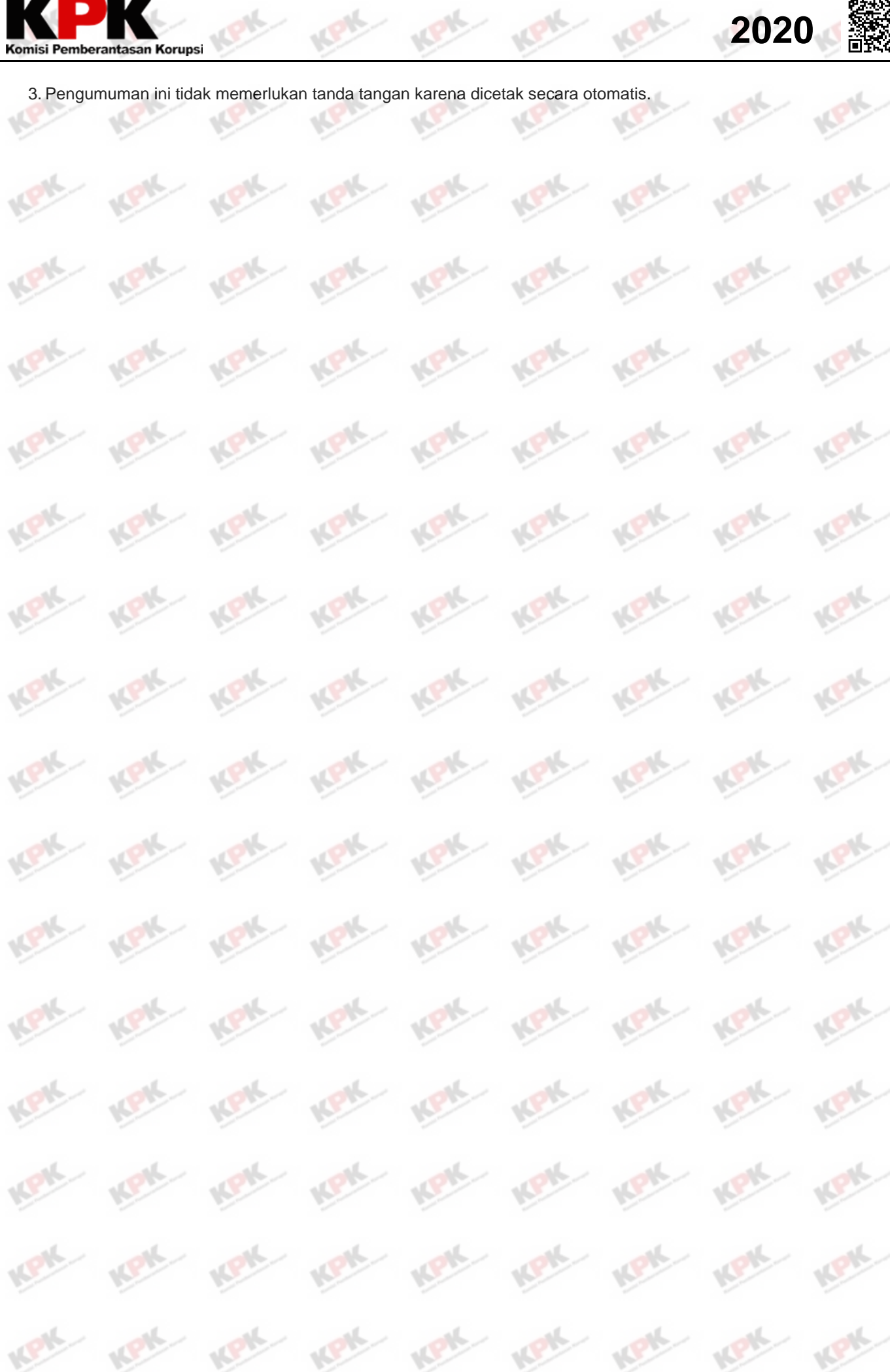
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 268.072.563

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Juli 2021/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI)

UNIT KERJA : KOMISI PENYIARAN INDONESIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ASWAR HASAN**

2. Jabatan : **ANGGOTA**

3. NHK : **820601**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **150.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 6 m2/6 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **147.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA ETIOS VALCO SEDAN Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO SOUL Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **8.000.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. **---**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **30.000.000**

F. HARTA LAINNYA Rp. **---**

Sub Total Rp. **335.000.000**

III. HUTANG Rp. **---**

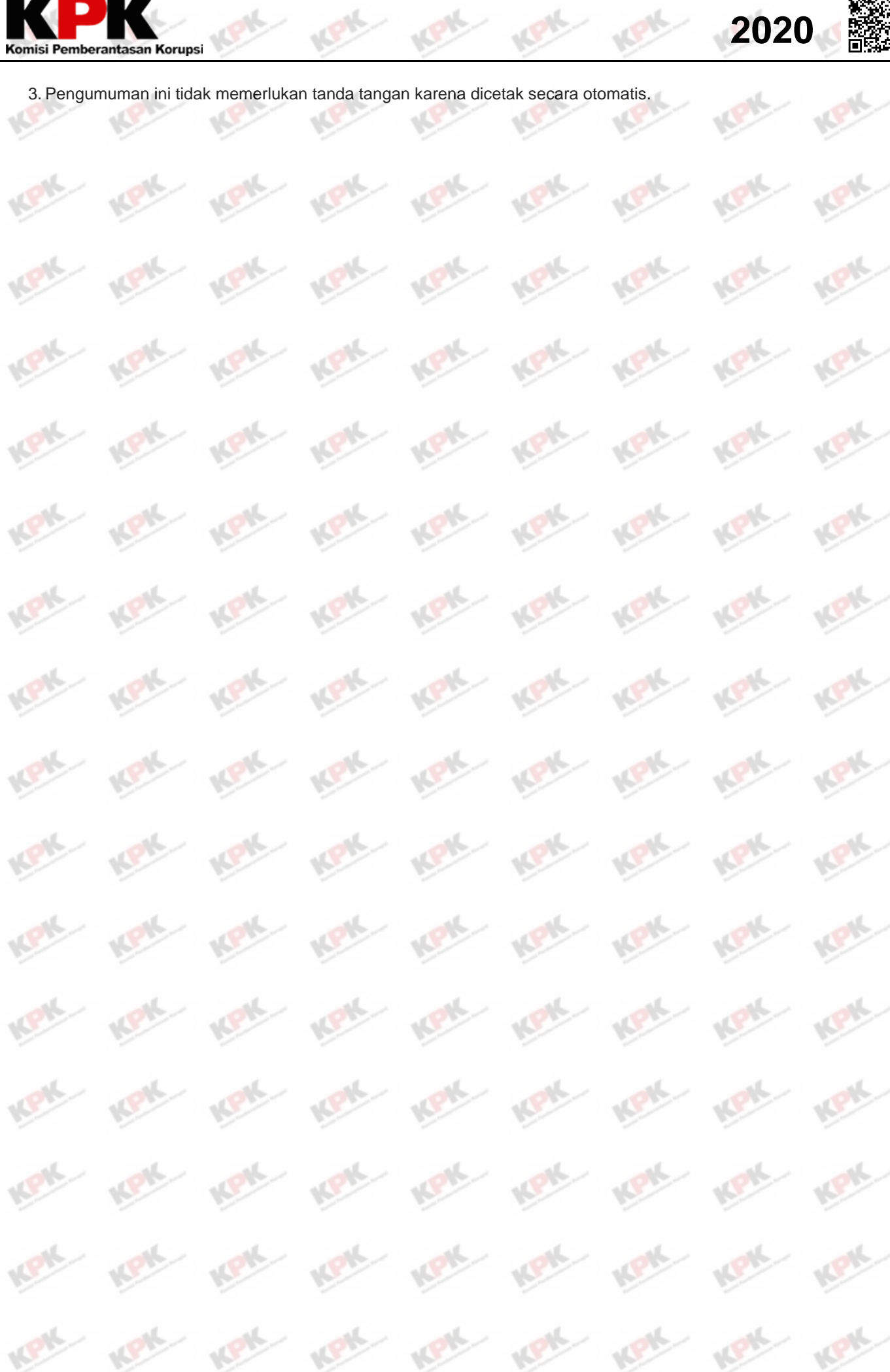
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **335.000.000**

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Juli 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI)

UNIT KERJA : KOMISI PENYIARAN INDONESIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **HARDLY STEFANO FENELON PARIELA**
2. Jabatan : **ANGGOTA**
3. NHK : **688520**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **1.700.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/105 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **175.000.000**

1. MOBIL, HONDA MOBILIO 1.5 CVT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **85.000.000**

D. SURAT BERTAHAP Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **188.836.215**

F. HARTA LAINNYA Rp. **----**

Sub Total Rp. **2.148.836.215**

III. HUTANG Rp. **1.015.888.637**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **1.132.947.578**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI)

UNIT KERJA : KOMISI PENYIARAN INDONESIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IRSAL AMBIA

2. Jabatan : ANGGOTA

3. NHK : 779283

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 650.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 197 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA
BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 70.000.000

1. MOBIL, TOYOTA COROLLA ALTIS COROLLA ALTIS Tahun 2002,
HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 91.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 811.000.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 811.000.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Juli 2021/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI)

UNIT KERJA : KOMISI PENYIARAN INDONESIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MIMAH SUSANTI

2. Jabatan : ANGGOTA

3. NHK : 822902

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. ----

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. ----

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERTHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 267.221.959

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 267.221.959

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 267.221.959

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Juli 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI)
UNIT KERJA : KOMISI PENYIARAN INDONESIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NUNING RODIYAH**
2. Jabatan : **ANGGOTA**
3. NHK : **630066**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.700.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m2/120 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah Seluas 675 m2 di KAB / KOTA PONOROGO, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
3. Tanah Seluas 1.355 m2 di KAB / KOTA PONOROGO, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
4. Tanah Seluas 666 m2 di KAB / KOTA PONOROGO, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 115.000.000

1. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 156.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 30.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 2.001.000.000

III. HUTANG Rp. 126.388.894

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.874.611.106

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI)
UNIT KERJA : KOMISI PENYIARAN INDONESIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YULIANDRE DARWIS
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 452771

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 9.880.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 450 m2/600 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , WARISAN Rp. 2.500.000.000
2. Tanah Seluas 9.985 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000.000
3. Tanah Seluas 42 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HADIAH Rp. 600.000.000
4. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , WARISAN Rp. 180.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 246 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 4.800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 747.000.000**

1. MOBIL, HONDA MOBILIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
2. MOBIL, TOYOTA INNOVA MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO MOTOR BEBEK Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
4. MOTOR, HONDA BEAT MOTOR BEBEK Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
5. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. ----**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.270.800.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	11.897.800.000
III. HUTANG	Rp.	3.900.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	7.997.800.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : UMRI
2. Jabatan : SEKRETARIS KOMISI
3. NHK : 99021

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.100.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m²/55 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m²/21 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m²/36 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 117.700.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 1.700.000
2. MOBIL, SUZUKI ERTIGA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HADIAH Rp. 6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 19.000.000**D. SURAT BERTAHAP** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 20.648.012**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 1.257.348.012

III. HUTANG Rp. 85.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.172.348.012

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.